

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Chidir, 1991, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Budiarto, Agus, 2002, *Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Brooks, M., 2009, *Liberalization in Maritime Transport*, Joint Transport Research Centre of the Organization for Economic Cooperation and Development, Paris.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2002, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Fakhrudin, Hendy M., 2008, *Istilah Pasar Modal A-Z*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Findlay, Christopher, 2013, *Priorities and Pathways in Services Reform: Political Economy Studies Part II*, World Scientific Studies in International Economics: Volume 25, University of Adelaide, Australia.
- Garner, Bryan A., 2004, *Black's Law Dictionary*, Ed. 8, Thomson West, St. Paul Minnesota.
- H.S, Salim, 2010, *Hukum Divestasi di Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- _____, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2003, *Metodologi Penelitian Sosial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Husseyn Umar, M., 2015, *Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indonesia, Buku I*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta
- _____, 2001, *Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indonesia, Buku II*, PT. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Idham, Anis, 1995, *Pranata Jaminan Kebendaan Hipotik Kapal Laut dan Masalah Eksekusi Hipotik Kapal Laut Ditinjau Dari Hukum Maritim*, Alumni, Bandung.

- Isnaeni, Moch., 1996, *Hipotek Pesawat Udara di Indonesia*, Dharma Muda, Surabaya.
- K. Martono dan Usman Malayu, 1996, *Perjanjian Angkutan Udara di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1994, *Makalah “Pembinaan Pelayaran Nasional dalam Rangka Penegakan Wawasan Nusantara”*, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Merk, O. and T.Notteboom, 2015, *Port Hinterland Connectivity, International Transport Forum Discussion Papers No. 2015/13*, OECD Publishing, Paris.
- Michaeli, Daniel, 2014, *Foreign Investment Restrictions in Coastwise Shipping: A Maritime Mess*, New York University School of Law, USA.
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muthiah, Aulia, 2016, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Nwezee, Augustine, 2006, *The Impact of Cabotage Act on Entrepreneurial Opportunities and Nigeria’s Economic Growth*, ST. Clement University.
- Purba, Hasim, 2005, *Hukum Pengangkutan Laut Perspektif Teori dan Praktek*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Saputra, Rivo Bagus, 2007, *Implementasi Asas Cabotage Dalam Hukum Pelayaran Indonesia*, Skripsi, Universitas Airlangga.
- Sembiring, Sentosa, 2007, *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Singh, Nagendra, 1993, *Recueil Des Cours, Collected Courses 1962, Volume 107 by Hague Academy of International Law*, Kluwer Academic Publishers Group, Netherlands.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum, cet.III*, UI Press, Jakarta.

Vibhanshu Shekhar *and* Joseph Chinyong Liow, 2014, *Indonesia as a Maritime Power: Jokowi's Vision, Strategies, and Obstacles Ahead*, The Brookings Institution, Washington, D.C.

Wehmeier, Sally, dkk., 2000, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oxford University Press, Oxford.

Widijowati, Rr. Dijan, 2012, *Hukum Dagang*, Andi Publisher, Yogyakarta.

Windari, Retno, 2009, *Hukum Laut, Zona-Zona Maritim Sesuai UNCLOS 1982 dan Konvensi-Konvensi Bidang Maritim*, Badan Koordinasi Keamanan Laut, Jakarta.

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, Lembaran Negara Nomor 151 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5070.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 32).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 966).

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1767).

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1768).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 733).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

the ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS).

U.S Code of Federal Regulation Title 46 - Shipping Part 67 - Documentation of Vessels.

United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982.

United Nations Convention on Conditions for Registration of Ship, 1986.

C. Internet

Adiatmaputra Fajar Pratama, INSA: Pendaftaran Kapal Baru Harus Mengikuti UU Pelayaran, <http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/03/11/insa-pendaftaran-kapal-baru-harus-mengikuti-uu-pelayaran>, diakses tanggal 15 April 2017.

A. Ruban, *As cabotage policy lift, Malaysian shipping firms look to relocate overseas*, <https://www.malaymail.com/s/1374091/as-cabotage-policy-lift-Malaysian-shipping-firms-look-to-relocate-overseas>, diakses tanggal 15 Desember 2018.

RR Putri Werdiningsih, *RIGS Kesulitan Tambah Kapal Berbendera Indonesia*, <http://www.kontan.co.id>, diakses tanggal 30 Juli 2018.

Trivitas, Febri Putra, 2011, Mengupas Konsep Asas Cabotage Sebagai Analisis Kebijakan Publik, Program Studi Transportasi Laut, Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, <https://www.scribd.com/document/71706872/Mengupas-Konsep-Asas-Cabotage-Sebagai-Analisis-Kebijakan-Publik>, diakses tanggal 1 Juni 2017.

<http://www.suduthukum.com/2017/01/asas-tujuan-dan-jenis-penanaman-modal.html>, diakses tanggal 9 Juni 2017.

https://en.wikipedia.org/wiki/Navigation_Acts, diakses tanggal 25 Oktober 2017.

<http://www.econlib.org/library/Enc/Mercantilism.html>, diakses tanggal 25 Oktober 2017.

<https://www.britannica.com/biography/Jean-Baptiste-Colbert>, diakses tanggal 1 Oktober 2017.

<http://jurnalmaritim.com/menko-maritim-resmikan-data-rujukan-kelautan-ri/>, diakses tanggal 23 Januari 2019.